INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI TAHUN 2018

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan X 100% Catatan: Sisa perkara :sisa perkara tahun sebelumnya	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan x 100% Catatan: Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Ketua PA harus	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	Tn.1- Tn Tn.1 x 100% Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		 d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding Kasasi PK 	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Jumlah Putusan Perkara x 100%	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	Catatan: PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuaiPeraturan Menteri PAN dan RBNomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Ketua PA	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu x 100% Jumlah Putusan	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Perkara	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi Catatan: Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat	Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap x 1009 Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		waktu d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website x 100% jumlah putusan perkara	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang diselesa ikan Jumlah Perkara Prodeo Catatan: Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan Catatan: Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Dirjen Badilag	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan(<i>Voluntai</i> <i>r</i>) Identitas Hukum	Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan Catatan: Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			 dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemerikasaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil 		
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti x 100% Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT Catatan: BHT: Berkekuatan Hukum Tetap	Ketua PA	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan